

Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi

<https://jurnal.feb-umi.id/index.php/ATESTASI>

This Work is Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah



Rosalynnda Buntuan ^(1*) Muhamad Yamin Noch ⁽²⁾ Fahrudin Pasolo ⁽³⁾ Zakaria ⁽⁴⁾
Suratini ⁽⁵⁾

⁽¹⁾ Magister Manajemen, Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua, Indonesia
^(2,3,4,5) Universitas Yapis Papua, Indonesia

Diterima: Juni 08, 2025 Disetujui: Juni 27, 2025

Tersedia secara online: Juni 28, 2025

Penulis Korespondensi: Muhamad Yamin Noch
abienoch12@gmail.com

	Abstrak
<p>Kata Kunci: sistem akuntansi keuangan daerah; kompetensi sumber daya manusia; sistem pengendalian internal; akuntabilitas laporan keuangan daerah</p> <p>Pernyataan Penulis: Penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau keuangan yang dapat dianggap sebagai potensi konflik kepentingan.</p> <p>Copyright © 2025 Atestasi. All rights reserved.</p>	<p>Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah di Kabupaten Pegunungan Bintang.</p> <p>Desain Penelitian dan Metodologi: Desain penelitian ini bersifat kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Data dikumpulkan dari 98 responden atau sebesar 96,08% dari total populasi sebanyak 102 orang yang merupakan aparatur pada OPD Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode probability sampling dengan jenis simple random sampling. Analisis data dilakukan melalui uji regresi linear berganda dengan pengujian parsial (uji t) untuk masing-masing variabel independen.</p> <p>Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa SAKD, kompetensi SDM, dan SPI secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah. Di antara ketiga variabel, SAKD memiliki pengaruh paling dominan dengan nilai koefisien beta sebesar 0,364 dan nilai t sebesar 4,666 pada tingkat signifikansi 0,000.</p> <p>Implikasi: Temuan ini mengindikasikan bahwa penguatan sistem akuntansi berbasis standar pemerintah merupakan langkah strategis dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Implikasi praktis dari penelitian ini mendorong pemerintah daerah untuk fokus pada pengembangan sistem akuntansi dan peningkatan kapasitas SDM. Studi lanjutan disarankan untuk memasukkan variabel lain seperti perencanaan anggaran, transparansi, dan adopsi teknologi informasi guna memperkaya model analisis.</p>

Pendahuluan

Akuntabilitas laporan keuangan daerah merupakan elemen kunci dalam pengelolaan organisasi publik, terutama dalam memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakat atas penggunaan dana publik. Akuntabilitas ini mencerminkan sejauh mana pengelolaan keuangan

dilakukan secara transparan, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mardiasmo, (2021) menjelaskan bahwa akuntabilitas laporan keuangan bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan menyajikan informasi yang relevan dan andal tentang penggunaan sumber daya publik. Dalam organisasi publik, akuntabilitas laporan keuangan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi persyaratan regulasi, tetapi juga sebagai alat evaluasi kinerja. Menurut (Olayinka & Osariemen, 2019), laporan keuangan yang akuntabel memungkinkan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, legislatif, dan auditor, untuk menilai apakah pemerintah telah menggunakan anggaran secara efektif untuk mencapai tujuan pembangunan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengeluaran pemerintah benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan pelayanan publik.

Akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan pilar utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Laporan keuangan yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berperan sebagai instrumen pengawasan eksternal dalam mencegah penyalahgunaan anggaran dan memperkuat transparansi pengelolaan keuangan publik (Chang et al., 2021). Selain berfungsi sebagai sarana kontrol, laporan keuangan yang akuntabel juga mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data (Harun et al., 2020). Informasi keuangan yang disajikan secara transparan dan tepat waktu menjadi dasar dalam menyusun perencanaan anggaran, menetapkan prioritas pembangunan, serta mengalokasikan sumber daya secara optimal. Namun demikian, pencapaian akuntabilitas laporan keuangan daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan pada sistem pengendalian internal, rendahnya kompetensi sumber daya manusia (SDM), dan hambatan dalam implementasi teknologi informasi menjadi faktor penghambat utama (Sari, 2022). Kondisi ini semakin kompleks di daerah dengan keterbatasan geografis dan infrastruktur, seperti Kabupaten Pegunungan Bintang. Daerah ini menghadapi tantangan besar dalam memastikan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta memiliki integritas dan akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan (Murtin & Rahmawati, 2023).

Secara ideal, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dirancang untuk mendukung efisiensi dan akurasi pelaporan keuangan. Namun, keterbatasan teknologi dan infrastruktur komunikasi menyebabkan sebagian besar proses pelaporan di Kabupaten Pegunungan Bintang masih dilakukan secara manual, sehingga meningkatkan risiko kesalahan dan keterlambatan pelaporan (Arifin et al., 2022). Selain itu, kompetensi SDM yang rendah, khususnya dalam hal pemahaman akuntansi dan penguasaan teknologi, turut memengaruhi kualitas laporan keuangan daerah (Oktaviani & Syarif, 2024). Lebih jauh, kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI), yang seharusnya menjamin keandalan informasi keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan, juga ditemukan sebagai permasalahan mendasar di daerah ini. Minimnya pengawasan internal dan kurangnya auditor yang kompeten berdampak pada rendahnya akuntabilitas laporan keuangan (Setyaningrum, 2020). Hal ini turut berkontribusi terhadap opini "Wajar Dengan Pengecualian" (WDP) yang diberikan oleh BPK atas laporan keuangan daerah Kabupaten Pegunungan Bintang (Simanjuntak, 2024).

Meskipun beberapa studi menunjukkan bahwa penerapan SIA, kompetensi SDM, dan SPI memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan (Oktaviani & Syarif, 2024; Ratnasari & Usman, 2024), terdapat pula penelitian yang menunjukkan hasil sebaliknya. Beberapa temuan menyebutkan bahwa implementasi sistem informasi akuntansi belum optimal karena lemahnya kontrol internal dan keterbatasan teknologi (Irfanio et al., 2024; Bale et al., 2023). Perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan adanya gap literatur yang perlu ditelusuri lebih lanjut, terutama dalam konteks daerah terpencil seperti Kabupaten Pegunungan Bintang. Demikian pula dengan kompetensi SDM dan SPI, hasil penelitian yang inkonsisten mengindikasikan perlunya pengkajian lebih lanjut terhadap pengaruh variabel-variabel tersebut dalam konteks geografis dan organisasi yang berbeda. Daerah seperti Kabupaten Pegunungan Bintang, yang menghadapi keterbatasan akses pendidikan, pelatihan, dan infrastruktur, merupakan contoh penting yang dapat memperkaya pemahaman tentang faktor-faktor penentu akuntabilitas keuangan daerah.

Berbagai regulasi, seperti PP No. 24 Tahun 2005 dan UU No. 1 Tahun 2022, menekankan pentingnya keterbukaan dan aksesibilitas informasi keuangan daerah. Dalam kerangka tersebut, sistem informasi akuntansi, kompetensi aparatur, dan sistem pengendalian internal tidak hanya berperan dalam mendukung pelaporan yang sesuai standar, tetapi juga dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan dipercaya publik (Maulana, 2021; Mardiasmo, 2021). Dengan mempertimbangkan kondisi faktual dan kesenjangan penelitian yang ada, maka penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih dalam pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Kompetensi SDM, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah. Penelitian ini difokuskan di Kabupaten Pegunungan Bintang yang memiliki tantangan unik secara geografis dan teknologis, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam perbaikan tata kelola keuangan daerah.

Ulasan Literatur

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah

Tersedianya sebuah sistem yang mendukung kinerja para pegawai aparatur pemerintah sangat diperlukan. Menurut Renyowijoyo, (2013) akuntansi keuangan daerah merupakan akuntansi yang dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan manajemen dan pengelolaan keuangan daerah, agar mampu membuat informasi laporan keuangan yang akurat, maka pengolahan datanya membutuhkan sebuah alat atau sistem yang mendukung yaitu SAKD. Dengan adanya SAKD ini dapat membantu memperlancar aparat dalam menghasilkan informasi berupa laporan keuangan dengan lengkap, akurat, efisien, efektif dan keterandalan laporan keuangan dapat tercapai, (Mardiasmo, 2009). Hasil penelitian (Oktaviani & Syarif, 2024) mengungkapkan bahwa implementasi sistem informasi akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah, terutama jika didukung oleh pelatihan berkelanjutan, hasil penelitiannya sejalan dengan beberapa penelitian lain yang dilakukan oleh (Ratnasari, Usman, 2024; Ni Komang Ayu Diah Astari, 2023; Dzahabiyah, 2023; Iriana Auliyah, 2023; Budiwitjaksono, 2023; Binawati & Nindyaningsih, 2022; Sinulingga et al., 2022).

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah

Seseorang yang memiliki kompetensi yang baik akan bekerja dengan pengetahuan dan keterampilannya sehingga dapat bekerja dengan mudah, cepat, intuitif dan dengan pengalamannya bisa meminimalisir kesalahan, dengan begitu kualitas pada informasi laporan keuangan akan terjaga. Hal ini juga selaras dengan pengertian kompetensi dalam penjelasan pasal 3 Peraturan Pemerintah (2000) bahwa, yang dimaksud dengan kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh PNS berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Menurut Martoyo (2007), sumber daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuannya. Untuk menilai kualitas aparatur dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari tingkat tanggungjawabnya dan kompetensi sumber daya tersebut. Kualitas sumber daya manusia yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas akan meningkatkan kandungan nilai informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kualitas aparatur daerah dalam melaksanakan sistem akuntansi dapat menimbulkan hambatan jika pemahaman penerapan ilmu akuntansinya rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas aparatur daerah yang baik, akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian oleh (Ratnasari, Usman, 2024) menemukan bahwa kompetensi SDM memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah, terutama jika didukung oleh pelatihan berkelanjutan dan ketersediaan fasilitas yang memadai. Sejalan dengan penelitian (Lisa Firanti, Agustini, 2024) menunjukkan kompetensi aparatur memiliki pengaruh terhadap pencapaian akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kemantren Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, beberapa penelitian lain yang mendukung penelitian tersebut antara lain (Astari, 2023; Iriana Auliyah, 2023; Widiastuti et al., 2023; Nislandi & Munari, 2023; Witjaksono, 2023; Sinamo & Yusra, 2022).

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pengelolaan Dana Desa

Dalam PP No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (fraud). Sistem Pengendalian Internal (SPI) memiliki peran penting dalam mendukung akuntabilitas laporan keuangan daerah, namun berbagai penelitian menunjukkan adanya hasil yang beragam, yang mencerminkan gap penelitian yang relevan untuk dieksplorasi lebih lanjut. Penelitian (Ratnasari & Usman, 2024; Bale et al., 2023; Nur et al., 2023; Ni Komang Ayu Diah Astari, 2023; Iriana Auliyah, 2023; Widiastuti et al., 2023; Nislandi & Munari, 2023; Sinamo & Yusra, 2022; Sinulingga et al., 2022) menunjukkan Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Kompetensi Sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah

Akuntabilitas laporan keuangan juga memiliki peran strategis dalam mencegah korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Laporan keuangan yang diaudit secara berkala dapat meningkatkan akuntabilitas pejabat publik, sehingga menciptakan budaya tata kelola pemerintahan yang lebih baik (Chang et al., 2021). Informasi keuangan yang disajikan secara transparan membantu pemerintah dalam merencanakan anggaran berikutnya, menetapkan prioritas pembangunan, dan mengalokasikan sumber daya secara optimal. Akuntabilitas laporan keuangan juga mendukung pengambilan keputusan berbasis data (evidence-based decision-making). Pengambilan keputusan yang berbasis pada laporan keuangan yang akuntabel lebih efektif dalam mencapai hasil pembangunan yang terukur (Harun et al., 2020). Untuk mewujudkan akuntabilitas yang ideal, pemerintah daerah harus mengatasi berbagai tantangan, seperti kelemahan dalam sistem pengendalian internal, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, dan hambatan dalam implementasi teknologi informasi. Akuntabilitas mengacu pada kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan pertanggungjawaban yang transparan, relevan, dan dapat diandalkan terkait pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat. Penelitian (Oktaviani dan Syarif, 2024), menunjukkan bahwa secara simultan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Geologi Mineral dan Batubara Kota Bandung. Penelitian (Irfanio et al., 2024) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dengan sistem informasi akuntansi sebagai variabel moderasi dan penelitian lain yang dilakukan oleh (Ratnasari, Usman, 2024) menyatakan bahwa secara simultan kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango.

Desain Penelitian dan Metodologi

Berdasarkan tujuan penelitian, jenis penelitian ini adalah penelitian penjelasan (explanatory), penelitian ini berupaya menjelaskan hubungan antara variabel-variabel dan pengaruhnya dengan pengujian hipotesis Sugiyono (2017). Rancangan dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pengukuran dengan cara obyektif terhadap fenomena sosial yang dijabarkan kedalam beberapa komponen masalah, variabel dan indikator (Sugiyono, 2017). Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang yang melaksanakan tugas mengelola keuangan serta bertanggung-jawabkan keuangan dalam bentuk Laporan Keuangan pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 102 pegawai pada

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang, dimana dari 34 OPD masing-masing diwakili oleh 3 ASN atau responden. Yang dijadikan populasi dalam penelitian ini pada pegawai yang melaksanakan tugas sebagai bendahara umum/pembantu/pendamping bendahara, operator sistem laporan keuangan daerah atau bagian verifikasi laporan keuangan dan pegawai yang memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan. Sampel dalam penelitian adalah seluruh jumlah populasi dengan teknik pengambilan sampel yaitu sampel Jenuh yaitu sebanyak 102 responden pada organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Pegunungan Bintang. Sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. (Sugiyono, 2017).

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Menurut Sekaran, (2006) data primer berasal dari pengisian kuesioner oleh responden dan data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Data primer adalah pengambilan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau objek penelitian yakni responden pada OPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang, sumber data primer diperoleh melalui angket (kuesioner). Adapun Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau merupakan penelitian, arsip yang memuat peristiwa masa lalu. Adapun data sekunder ini diperoleh melalui jurnal, buku maupun internet. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah metode kuisisioner yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab Sugiyono, (2013). Dalam penelitian ini menggunakan skala likert dalam pengukuran sebagai rujukan dan standar penelitian data. Hal ini dimaksudkan agar hasil penelitian ini terukur dan menghasilkan data yang valid dan bersifat obyektif. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier Berganda dengan basis teknik Uji Statistik t, Uji Statistik F, dan Koefisien Determinasi dengan bantuan software SPSS 26.0 for windows.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat validitas atau kesahihan suatu instrumen, sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang ingin diukurnya atau dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukan sejauhmana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud Arikunto (2017). Sementara menurut Sugiyono (2017), hasil penelitian yang valid apabila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Bila nilai r hitung (pearson correlation) lebih besar dari r tabel maka dikatakan valid dan sebaliknya tidak valid.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Variabel	Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan	Cronbach's Alpha	Keterangan
Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah (Y)	Y1	0,736	0,1966	Valid	0,905	Sangat Reliabel
	Y2	0,813	0,1966	Valid		
	Y3	0,817	0,1966	Valid		
	Y4	0,861	0,1966	Valid		
	Y5	0,745	0,1966	Valid		
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)	X1.1	0,774	0,1966	Valid	0,861	Sangat Reliabel
	X1.2	0,749	0,1966	Valid		
	X1.3	0,831	0,1966	Valid		
	X1.4	0,694	0,1966	Valid		
	X1.5	0,721	0,1966	Valid		
	X1.6	0,656	0,1966	Valid		
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)	X2.1	0,801	0,1966	Valid	0,889	Sangat Reliabel
	X2.2	0,783	0,1966	Valid		
	X2.3	0,793	0,1966	Valid		
	X2.4	0,598	0,1966	Valid		
	X2.5	0,380	0,1966	Valid		
	X2.6	0,506	0,1966	Valid		

Variabel	Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan	Cronbach's Alpha	Keterangan
Sistem Pengendalian Internal (X3)	X3.1	0,754	0,1966	Valid	0,874	Sangat Reliabel
	X3.2	0,825	0,1966	Valid		
	X3.3	0,796	0,1966	Valid		
	X3.4	0,846	0,1966	Valid		
	X3.5	0,668	0,1966	Valid		
	X3.6	0,553	0,1966	Valid		

Sumber: Olah Data 2025, SPSS 26.0 for windows

Sebuah instrumen dikatakan reliabel, jika mendapatkan hasil yang sama dari gejala pengukuran yang tidak berubah yang dilakukan pada waktu yang berbeda-beda. Uji reliabilitas dilakukan dengan menghitung Cronbach's alpha dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel suatu konstruk dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach's alpha > 0,70. Ghazali (2018). Berdasarkan 1, dapat diketahui bahwa semua butir pernyataan untuk variabel sistem akuntansi keuangan daerah (X1), kompetensi sumber daya manusia (X2), sistem pengendalian internal (X3) dan variabel Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah (Y) menunjukkan bahwa semua item pertanyaan dari setiap variabel penelitian memiliki nilai korelasi product moment atau nilai r hitung lebih besar dari nilai kritis r tabel atau R Hitung > R Tabel dengan $\alpha = 0,05$ atau 5% dan Corrected Item-Total Correlation masing-masing indicator > 0,1966, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan penelitian valid. Hasil uji reliabilitas dari masing-masing variabel mempunyai nilai Cronbach's Alpha > 0,60 hal ini menunjukkan bahwa Pernyataan dalam kuesioner ini Sangat Reliabel karena mempunyai nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel independen dan variabel dependen, atau keduanya dalam suatu model regresi berdistribusi normal atau tidak. Model regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas dan data variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau normal sama sekali Sunyoto (2013). Salah satu cara untuk mendeteksi normalitas data adalah dengan menggunakan normal probability plot yang pada prinsipnya suatu data ril dikatakan berdistribusi normal jika data ril mengikuti garis diagonal.

Tabel 2. Hasil Uji Kolmogorof-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		84
Normal Parameters,a,b	Mean	,000000
	Std. Deviation	,30118770
Most Extreme Differences	Absolute	,043
	Positive	,043
	Negative	-,041
Test Statistic		,043
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Olah Data 2025, SPSS 26.0 for windows

Berdasarkan tabel 2 hasil uji Kolmogorof-Smirnov di atas, maka data penelitian ini dapat dikatakan telah memenuhi unsur normalitas. Hal ditunjukkan dengan dengan nilai Asymp.Sig. (2 failed) sebesar 0,200c.d. Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) Ghazali (2018). Model regresi yang baik harus bebas dari masalah multikolinearitas. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan Varians Inflation Factor (VIF). Dasar pengambilan keputusan adalah apabila nilai tolerance > 0,1 atau sama dengan nilai VIF < 10 berarti tidak ada multikolinieritas antar variabel dalam model regresi.

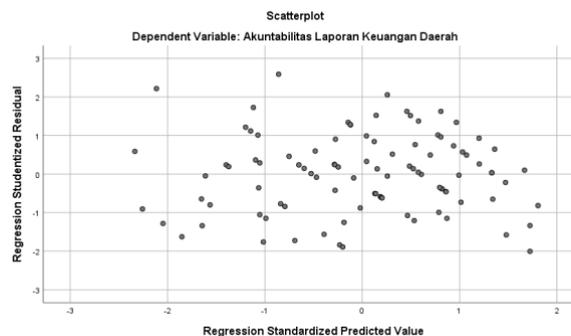
Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SKAD)	0,420	2,381
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,358	2,790
Sistem Pengendalian Internal	0,493	2,027

Sumber: Olah Data 2025, SPSS 26.0 for windows

Dari tabel 3 di peroleh nilai tolerance Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1) sebesar 0,420, Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) sebesar 0,358, dan Sistem Pengendalian Internal (X3) sebesar 0,493 dimana tingkat toleransi dari masing-masing variabel tersebut lebih besar dari 0,10 sedangkan nilai VIF Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1) sebesar 2,381, Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) sebesar 2,790, dan Sistem Pengendalian Internal (X3) sebesar 2,027, maka dapat disimpulkan bahwa dari masing-masing variabel independen memiliki nilai ≤ 10 , dimana dan nilai Tolerance lebih besar dari 0,50, hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini tidak menunjukkan adanya gejala multikolinearitas, dan hal ini juga menjelaskan bahwa semua variabel dapat digunakan sebagai variabel yang saling independen, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada variabel independen dalam penelitian ini.

Uji heteroskedastisitas pada prinsipnya untuk menguji apakah varian semua variabel adalah konstan (sama), dalam arti tidak terjadi hubungan antara variabel pengganggu dengan variabel bebasnya. Ini berarti bahwa variasi nilai-nilai Y disekitar rata-ratanya tersebut adalah konstan untuk semua X. Jika varian tidak sama maka dikatakan terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID Ghazali (2018). Uji asumsi heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi varian dari residual dari pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah model yang bebas dari gejala heteroskedastisitas Ghazali, (2018).



Gambar 1. Hasil Uji Heterokedastisitas

Pada gambar 1 grafik scatterplot diatas menunjukkan bahwa titik-titik data menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini mengindikasikan tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi. Selanjutnya dilakukan Analisis regresi berganda digunakan dalam melakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD), Kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal sebagai variabel bebas (Independent) terhadap akuntabilitas laporan keuangan sebagai variabel terikat (Dependent). Pembuktian terhadap hipotesis dengan empat variabel bebas sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon.$$

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda dan Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,038	0,248		0,152	0,880
1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SKAD)	0,342	0,073	0,364	4,666	0,000
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,412	0,101	0,344	4,068	0,000
Sistem Pengendalian Internal	0,261	0,070	0,268	3,729	0,000

Sumber: Olah Data 2025, SPSS 26.0 for windows

Dari Tabel 4, dapat diperoleh model persamaan regresi berdasarkan hasil analisis yaitu:

$$Y = 0,038 + 0,342X_1 + 0,412X_2 + 0,261X_3 + e,$$

Nilai konstanta sebesar 0,038 menunjukkan arah yang positif, yang mengandung makna bahwa akuntabilitas laporan keuangan daerah di lingkungan Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, mengalami peningkatan sebesar 0,038 satuan atau setara dengan 3,8% tanpa dipengaruhi oleh variabel sistem akuntansi keuangan daerah (X1), kompetensi sumber daya manusia (X2), dan sistem pengendalian internal (X3). Selanjutnya, nilai koefisien regresi pada variabel sistem akuntansi keuangan daerah (X1) sebesar 0,342 juga menunjukkan arah yang positif, yang berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam sistem akuntansi keuangan daerah akan meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan daerah sebesar 0,342 satuan atau 3,42%, dengan asumsi bahwa variabel lain dalam model tetap konstan. Hal serupa ditunjukkan oleh variabel kompetensi sumber daya manusia (X2), yang memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,412. Ini mengindikasikan bahwa peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebesar satu satuan akan berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas laporan keuangan daerah sebesar 0,412 satuan atau 4,12%, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Sementara itu, variabel sistem pengendalian internal (X3) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,261 yang juga menunjukkan hubungan positif, di mana setiap peningkatan satu satuan dalam sistem pengendalian internal akan meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan daerah sebesar 0,261 satuan atau 2,61%, dengan asumsi variabel lainnya tidak berubah.

Uji statistik F dikenal dengan uji simultan adalah uji yang menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat atau dependen. Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan Fhitung dengan Ftabel. Bila nilai Fhitung > Ftabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima dengan nilai signifikan < 5% atau 0,05 dan sebaliknya jika nilai Fhitung < Ftabel maka Ho diterima atau Ha ditolak dengan nilai signifikan > 5% atau 0,05.

Tabel 5. Hasil Uji f (uji Simultan)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	27,811	3	9,270	99,034	,000 ^b
Residual	8,799	94	,094		
Total	36,611	97			

a. Dependent Variable: Kinerja Pegawai

b. Predictors: (Constant), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SKAD), Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal

Sumber: Olah Data 2025, SPSS 26.0 for windows

Hasil analisis dengan menggunakan program SPSS versi 26.0 for windows pada tabel 5.18 diperoleh nilai F hitung sebesar 99,034 > 2.46 nilai sig (p value) sebesar 0.000. Hal tersebut menunjukkan 0,000 < 0,05 nilai (sig) = 0,000 < alpha yang dipersyaratkan (0,05.), dengan demikian Ha diteima dan Ho ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa, sistem akuntansi keuangan daerah (SKAD) (X1), kompetensi sumber daya manusia (X2) dan sistem pengendalian internal (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah dilingkungan Kabupaten Pegunungan Bintang, sehingga hipotesis keempat diterima.

Pengujian ini dihitung besarnya koefisien determinasi (R^2) dari kedua persamaan yang merupakan koefisien yang menunjukkan besarnya persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen Ghozali (2018). Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,05 atau 5%. Koefisien determinasi (Adjusted R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen Nilai Adjusted R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.

Tabel 6. Hasil Uji Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,872 ^a	0,782	0,760	0,752	0,30596

a. Predictors: (Constant), Lingkungan Kerja, Kompetensi SDM, Disiplin Kerja

b. Dependent Variable: Kinerja Pegawai

Sumber: Olah Data 2025, SPSS 26.0 for windows

Berdasarkan tabel 6, diketahui nilai Adjusted R^2 sebesar 0,752 hal ini menunjukkan bahwa persentase kontribusi pengaruh variabel independen sistem akuntansi keuangan daerah (SKAD) (X1), kompetensi sumber daya manusia (X2) dan sistem pengendalian internal (X3) terhadap variabel dependen akuntabilitas laporan keuangan daerah dilingkungan Kabupaten Pegunungan Bintang sebesar 75,2% Sedangkan sisanya 24,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini, seperti; Perencanaan anggaran, transparansi, penggunaan teknologi informasi, kualitas laporan, regulasi atau kebijakan dan variabel-variabel lain.

Pembahasan

Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Pegunungan Bintang. SAKD mencakup prosedur manual dan elektronik untuk pencatatan, klasifikasi, dan pelaporan transaksi keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah, berperan sebagai pondasi untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tantangan seperti pemahaman terbatas terhadap akuntansi berbasis akrual dan belum meratanya penggunaan perangkat lunak seperti SIMDA dan SIPKD menjadi hambatan utama. Untuk meningkatkan akuntabilitas, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, implementasi teknologi informasi terintegrasi, pengawasan internal yang kuat melalui inspektorat, serta pembentukan budaya kerja profesional dan integritas. Dukungan kebijakan dari pemerintah daerah juga esensial, termasuk penyusunan SOP, penguatan wewenang, dan pemberian apresiasi bagi OPD berprestasi. Penerapan SAKD yang solid menjadi syarat mutlak tercapainya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Analisis mengonfirmasi bahwa kompetensi SDM secara signifikan meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan daerah. Kompetensi yang dimaksud mencakup pengetahuan teknis, penguasaan sistem akuntansi berbasis akrual, regulasi, dan sikap profesional. Kendala geografis dan terbatasnya akses pelatihan mengakibatkan masih banyak aparatur belum optimal dalam menyusun dan melaporkan keuangan berbasis perangkat digital. Rekomendasi strategis meliputi pelatihan berkala, evaluasi kompetensi, dan pemberian insentif bagi pegawai berkinerja tinggi. Pemerintah daerah juga perlu menyusun roadmap pengembangan SDM, menjalin kemitraan dengan lembaga pelatihan, serta memperkuat fungsi inspektorat. Kompetensi yang meningkat diyakini akan menghasilkan laporan keuangan yang andal, tepat waktu, dan sesuai standar, sehingga memperkuat legitimasi dan profesionalisme lembaga.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal (SPI) berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan OPD. SPI, sebagaimana diatur dalam PP No. 60/2008, mencakup kebijakan, prosedur, pemantauan, dan evaluasi untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Meskipun sebagian OPD telah menerapkan SPI, kelemahan seperti dokumentasi lemah, pemantauan berkala yang belum optimal, serta minimnya dukungan

infrastruktur TI masih ditemukan. Pimpinan OPD harus memperkuat komitmen terhadap pengendalian internal melalui kebijakan SDM, struktur SOP yang jelas, dan pemanfaatan TI. Evaluasi rutin melalui audit internal, monitoring berkala, serta kolaborasi dengan BPKP dan perguruan tinggi diperlukan untuk menjaga SPI tetap efektif. Penegakan reward and punishment dan partisipasi aktif Inspektorat Daerah sangat penting. Penerapan SPI secara konsisten akan menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dan kredibel, sebagai wujud pertanggungjawaban publik dan dasar pengelolaan pemerintahan yang bersih.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), kompetensi sumber daya manusia (SDM), dan sistem pengendalian internal (SPI) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pegunungan Bintang. Ketiga variabel tersebut saling berkaitan dan tidak dapat berdiri sendiri dalam mendorong terciptanya laporan keuangan yang transparan, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks geografis dan administratif yang menantang seperti di Kabupaten Pegunungan Bintang, sinergi antara sistem, manusia, dan pengawasan menjadi krusial untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel.

SAKD berperan penting dalam proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Namun, implementasi SAKD di daerah ini masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain terbatasnya infrastruktur teknologi, rendahnya pemahaman terhadap aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), serta kurangnya disiplin dalam pencatatan real-time. Kendala-kendala tersebut berdampak pada kualitas laporan keuangan, seperti keterlambatan pelaporan, kesalahan material, hingga potensi penyimpangan. Oleh karena itu, penguatan sistem akuntansi yang berbasis teknologi dan sesuai dengan standar harus menjadi prioritas.

Kompetensi SDM juga menjadi faktor penentu dalam menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. SDM yang kompeten memiliki kemampuan teknis, pemahaman terhadap regulasi keuangan, keterampilan penggunaan aplikasi, serta integritas dalam menjalankan tugas. Namun, di lingkungan OPD Kabupaten Pegunungan Bintang, masih ditemukan kesenjangan kompetensi, terutama dalam hal kualifikasi pendidikan, pengalaman, dan minimnya pelatihan teknis. Rendahnya kompetensi ini berdampak langsung terhadap proses pelaporan keuangan. Untuk itu, upaya peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, bimbingan teknis, dan pendampingan dari instansi pengawas seperti BPKP menjadi sangat penting untuk mendukung akuntabilitas laporan keuangan.

Sistem pengendalian internal merupakan elemen penting dalam memastikan seluruh kegiatan keuangan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mencegah terjadinya penyimpangan. SPI yang efektif mencakup pemisahan fungsi, pengawasan internal, dan audit yang berkelanjutan. Di OPD Kabupaten Pegunungan Bintang, penguatan SPI sangat diperlukan untuk memastikan akurasi dan integritas data keuangan yang dilaporkan. Sistem pengendalian yang lemah dapat mengurangi kepercayaan terhadap laporan keuangan yang dihasilkan, sehingga berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Ketiga variabel tersebut SAKD, kompetensi SDM, dan SPI saling melengkapi dalam menciptakan laporan keuangan yang akuntabel. SAKD yang baik membutuhkan SDM yang kompeten untuk mengelolanya, dan kedua komponen tersebut harus diawasi dengan sistem pengendalian internal yang kuat agar fungsi akuntabilitas berjalan optimal. Integrasi ketiganya menciptakan tata kelola keuangan yang transparan, efisien, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah yang kompleks, seperti di Kabupaten Pegunungan Bintang, sinergi antara sistem, manusia, dan pengawasan harus terus diperkuat secara berkelanjutan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu, antara lain Oktaviani dan Syarif (2024), yang menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi SDM secara bersama-sama mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Demikian pula, Irfanio et al. (2024)

menemukan bahwa kompetensi SDM dan SPI berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, dengan sistem informasi akuntansi sebagai variabel moderasi. Selain itu, Ratnasari dan Usman (2024) juga menemukan pengaruh simultan antara kompetensi SDM, sistem informasi akuntansi, dan SPI terhadap kualitas laporan keuangan desa. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat bukti empiris bahwa integrasi antara sistem, SDM, dan pengawasan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan laporan keuangan daerah yang akuntabel.

Conclusion

Penelitian ini mengungkap bahwa implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), kompetensi sumber daya manusia (SDM), dan sistem pengendalian internal (SPI) secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pegunungan Bintang. Ketiga variabel tersebut saling melengkapi dan membentuk fondasi tata kelola keuangan daerah yang akuntabel. SAKD berperan dalam memastikan proses pencatatan dan pelaporan sesuai standar, kompetensi SDM menjadi penentu kualitas pelaksanaan sistem, dan SPI menjamin seluruh aktivitas keuangan berjalan sesuai aturan serta bebas dari penyimpangan. Temuan ini menunjukkan pentingnya sinergi antara sistem, manusia, dan pengawasan sebagai pilar utama dalam mewujudkan laporan keuangan yang transparan, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara ilmiah, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur mengenai faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah, khususnya di wilayah yang memiliki tantangan geografis dan kapasitas kelembagaan yang terbatas. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang terintegrasi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, mulai dari penguatan sistem akuntansi, peningkatan kapasitas SDM, hingga optimalisasi fungsi pengawasan internal. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya pendekatan sistemik dan berkelanjutan dalam membangun tata kelola keuangan publik yang profesional, terpercaya, dan efisien.

Keterbatasan utama dalam penelitian ini terletak pada ruang lingkup geografis yang terbatas pada satu kabupaten, sehingga generalisasi hasilnya memerlukan kehati-hatian. Selain itu, variabel-variabel lain seperti budaya organisasi, komitmen pimpinan, serta adopsi teknologi digital belum diikutsertakan secara eksplisit dalam analisis. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk mengembangkan model yang lebih komprehensif dengan melibatkan wilayah dan level pemerintahan yang lebih luas, serta menggali peran variabel kontekstual dan kebijakan nasional dalam mendorong akuntabilitas keuangan daerah. Pendekatan kualitatif juga dapat digunakan untuk memahami dinamika sosial dan kelembagaan yang memengaruhi implementasi ketiga variabel utama secara lebih mendalam.

References

- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 3(1). <https://doi.org/10.22515/jifa.v3i1.2369>
- Arifin, J., Mohd-Sanusi, Z., & Hidayah, E. (2022). Determinants of the Quality of Local Government Financial Statements in Indonesia: Coercive Pressure Dominates. *Humanities and Social Sciences Letters*, 10(3), 336-355. <https://doi.org/10.18488/73.v10i3.3074>
- Arikunto, S. (2017). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Bale, P. J., Marlina, T., & Fahmie, A. (2023). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *JIKES; Jurnal Informatika Kesatuan*, 3(2). <https://doi.org/10.37641/jikes.v3i2.1815>
- Binawati, E., & Nindyaningsih, C. T. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *OPTIMAL*, 19(1), 19-39.

- Budiwitjaksono, S. M. T. G. S. (2023). Pengaruh kompetensi SDM, sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), dan penggunaan siskeudes terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 7(2), 1596–1608.
- Chang, Z., Rusu, V., & Kohler, J. C. (2021). The Global Fund: why anti-corruption, transparency and accountability matter. *Globalization and Health*, 17, 1–11.
- Defana, F. A., & Rahayu, S. (2023). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021). *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 21–30. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1.2681>
- Dzahabiyah, R. K. A. L. (2023). Pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(5), 1–21. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/5212>
- Emilianus Eo Kutu Goo, & Paulus Libu Lamawitak. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sikka. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(2), 98–110. <https://doi.org/10.33059/jensi.v5i2.4440>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 9)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harun, M. S., Hussainey, K., Mohd Kharuddin, K. A., & Farooque, O. Al. (2020). CSR disclosure, corporate governance and firm value: a study on GCC Islamic banks. *International Journal of Accounting & Information Management*, 28(4), 607–638.
- Hasliani, M. Y., & Yusuf, M. (2021). Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa. *YUME: Journal of Management*, 4(1), 179–192. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.234>
- Indraswari, N. E., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–15. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3866>
- Irfanio, N., Hafiez, R., & Adli, S. (2024). Pengujian Moderasi Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kepada Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Inovatif*, 2(2), 104–118. <https://doi.org/10.59330/jai.v2i2.43>
- Iriana Auliyah. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jayapura. *Bongaya Journal of Research in Accounting*, 6(1), 41–53. <https://doi.org/10.37888/bjra.v6i1.383>
- Lisa Firanti. Agustini, A. L. L. (2024). The influence of apparatus competence and financial accounting systems on the accountability of village fund management moderated by the internal control system. *COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting*, 7, 5342–5356.
- Maju, S. (2020). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa (Studi Kasus di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat). *Jurnal Ilmiah Kohesi*, 4(2), 3–15.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi sektor publik-edisi terbaru*. Penerbit Andi.
- Maulana, R. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern dan Good Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan (studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka). *JAKSI Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Sistem Informasi*, 2(1), 126–137. <http://bandung.bpk.go.id/>

- Murtin, A., & Rahmawati, S. I. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran, Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial. *Jurnal Akuntansi Inovatif*, 1(1), 17–28. <https://doi.org/10.59330/jai.v1i1.3>
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 92–107. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283>
- Ni Komang Ayu Diah Astari, N. K. S. dan N. K. M. (2023). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, April, 117–127.
- Nislandi, N. A., & Munari, M. M. (2023). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Sidoarjo. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 12(2), 143. <https://doi.org/10.35906/equili.v12i2.1518>
- Noch, M. Y., & Husen, S. (2015). *Metode Penelitian Untuk Akuntansi dan Manajemen* (M. B. H. Ibrahim (ed.)). Perdana Publishing.
- Nugroho, A. (2011). *Perancangan dan Implementasi Sistem Basis Data*. Penerbit Andi.
- Nur Afiah, N. (2010). Pengaruh Kompetensi Anggota DPRD Dan Aparatur Pemerintah Daerah, Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi, Penganggaran Serta Kualitas Informasi Keuangan Terhadap Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintah Daerah Yang Baik: Survey Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Ba. *Sosiohumaniora*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v12i1.5436>
- Nur, M. M., Sopanah, A., & Puspitosarie, E. (2023). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Sistem Informasi Akuntansi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*, 10(1), 48–58. <https://doi.org/10.35838/jrap.2023.010.01.05>
- Oktaviani dan Syarif. (2024). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Geologi Mineral dan Batubara Kota Bandung. *Economic Reviews Journal*, 3(2), 1470–1487. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i2.481>
- Olayinka, E., & Osariemen, A. (2019). Does public transparency and accountability impact sustainable development goals? A case study of selected African countries. *African Accounting and Finance Journal*, 2(1), 24–52.
- Panjaitan, R. S., Simanjuntak, A., Sembiring, Y. N., & Benyamin Siahaan, S. (2022). Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Di Desa Motung, Pardumuan Motung dan Parsaoran Sibisa). *Jurnal Manajemen*, 8(1), p-ISSN. <http://ejournal.lmiimedan.net>
- Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, (2000).
- Ratnasari, Usman, M. (2024). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa: Studi Kasus Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(6), 4881–4897. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i6.2116>
- Sari, D. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban. *Jurnal Sustainable*, 2(1), 151. <https://doi.org/10.30651/stb.v2i1.13444>
- Sekaran, U. (2006). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis* (4th ed.). Salemba Empat.
- Setyaningrum, D. (2020). *Determinants Quality of Local Government Financial Statements in Indonesia*. May.
- Simanjuntak, T. H. (2024). Audit Internal terhadap Kecurangan dan Penyimpangan Keuangan Pemerintah Daerah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 949–961.
- Sinamo, E. F., & Yusra, M. (2022). Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Dalam

- Mengelola Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh*, 1(1), 237-252.
<https://doi.org/10.29103/jam.v>
- Sinulingga, P. S. B., Simanjuntak, A., & Ginting, M. C. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kompetensi Aparatur Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo). *Jurnal Manajemen*, 8(1), 89-106.
<http://ejournal.lmiimedan.net/index.php/jm/article/view/158>
- Siti Hasanah, T. R. S. S. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD di Kabupaten Labuhanbatu. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia UNIMED*, 9(1), 14-23. <https://doi.org/10.37932/ja.v9i1.90>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunyoto, D. (2013). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Refika Aditama.
- Widiastuti, I. A., Indraswarawati, S. A. P. A., & Putra, I. M. E. L. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 65-75.

-----, Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

-----, Peraturan Pemerintah. (2004). Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. *Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*.

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 mengenai Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2005.

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2010.

-----, Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. *Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.

-----, Peraturan Pemerintah. (2013). Peraturan Pemerintah No 64 Tahun 2013 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. *Peraturan Pemerintah No 64 Tahun 2013 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan*.

-----, Peraturan Gubernur Papua Nomor 4A Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Papua Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua;

-----, Peraturan Pemerintah. (2015). Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah. *Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah*.

-----, Peraturan Gubernur Papua Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua;